

PERANAN SOCIAL CAPITAL SEBAGAI PIRANTI SOSIAL KOMUNITAS DILIHAT DARI DIMENSI TEORITIS DAN EMPIRIS

Mu'man NURYANA

Peneliti pada Balatbangsos, Departemen Sosial, Jakarta

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan peran dan pentingnya *social capital* sebagai *piranti sosial* pada level komunitas, dan sekaligus menjawab pertanyaan apakah *social capital* masih eksis di Indonesia. Secara kritis, *social capital* dipandang sebagai suatu landasan bagi asumsi pembangunan sosial pada level komunitas. Analisis terhadap peranan *social capital* sangat mendesak mengingat *policymakers* membutuhkan masukan untuk mendukung kebijakan pembangunan sosial yang bertumpu pada kemampuan masyarakat. Diharapkan, *social capital* sebagai piranti sosial yang berakar pada komunitas, dapat berfungsi secara maksimal tetapi dinamik dalam mengatasi masalah sosial. Bahasan ini diharapkan dapat menambah keyakinan kita bahwa *social capital* dapat direkayasa ulang, asal dilakukan oleh dan untuk anggota komunitas. Dengan demikian, tugas *scholars*, *policymakers*, *practitioners* adalah memfasilitasi komunitas agar mereka menyadari bahwa ada piranti sosial yang dapat didayagunakan untuk berbagai tantangan yang dihadapi pada hampir semua aspek kehidupan, tentunya pada level komunitas.

1. PENDAHULUAN

Dalam Lima tahun terakhir penggunaan istilah *social capital* terutama di kalangan *scholars*, *policymakers*, dan *practicioners* di Indonesia cukup frekuentif dan intensif disebabkan mereka terpacu oleh suatu kondisi di mana paradigma pembangunan telah bergeser dari sentralistik kepada desentralistik. Desentralisasi pembangunan tersebut memotivasi mereka untuk menyiapkan sebuah konsep pembangunan baru yang memungkinkan masyarakat mampu mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi dan mampu meningkatkan kesejahteraannya, dalam situasi di mana peranan pemerintah berkurang secara signifikan.

Di kalangan *scholars*, isu mengenai *social capital* sudah menjadi wacana bahkan menjadi tema bahasan

sejumlah diskusi atau topik tesis dan disertasi sejumlah mahasiswa pas-casarjana terutama di Universitas Indonesia. Sejumlah peneliti pada institusi riset untuk sektor sosial mulai mengkaji apa saja bentuk-bentuk *social capital* dimaksud, dan apa peranan serta sejauh mana pentingnya *social capital* tersebut dalam kehidupan masyarakat. Tujuan riset yang mereka lakukan adalah untuk mendukung pembangunan, agar lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Lancarnya komunikasi dan interaksi antara *scholars* dengan *policymakers* melalui berbagai seminar misalnya, telah mendorong *policymakers* untuk mulai mempertimbangkan dan memposisikan *social capital* dalam program pemberdayaan masyarakat. Walaupun hal ini masih *premature*, tetapi upaya memasukan *social capital* dalam kebijakan pemberdayaan mas-

yarakat merupakan inisiatif yang positif.

Sementara itu, di kalangan *practitioners* yang bekerja di sektor sosial sudah mulai mempertimbangkan berbagai strategi pendampingan yang paling efisien tetapi efektif agar komunitas miskin mampu menghindari risiko dan kerentanan, dilihat dari lensa *social capital*. Mereka menyadari bahwa pendekatan individu dalam memberikan pelayanan sosial relatif mahal. Dengan mempertimbangan *social capital* sebagai entry point, maka pendampingan menjadi lebih efisien tetapi efektif dan yang lebih penting lebih terjamin berkesinambungannya.

Negara hingga kini belum mampu menjabarkan amanat pasal 34 UUD 1945 untuk membangun sistem jaminan sosial yang melindungi kesejahteraan sosial warga negara. Oleh karena itu, ketiga pihak tersebut terpacu untuk mencari solusi fundamental untuk melindungi warga masyarakat terutama komunitas miskin lepas dari risiko dan kerentanan. Adanya upaya ketiga pihak tersebut positif, karena hingga sekarang pihak-pihak terkait hanya memikirkan bagaimana melakukan eksplorasi terhadap dua dari tiga harta yang dimiliki masyarakat, yakni *physical capital* dan *human capital*, sedangkan harta ketiga yaitu *harta sosial (social capital)* belum dieksplorasi dengan bijaksana.

Mungkin timbul pertanyaan, apakah harta sosial masih ada di bumi Indonesia? Bila ya, apakah *social capital* masih berfungsi dengan baik pada masyarakat? Pertanyaan ini muncul, karena perspektif *human history* (Galting, 1996), melihat bahwa *social capital* mulanya adalah "product" dari proses kristalisasi ikatan sosial dan jaringan kerja antar-warga masyarakat

tradisional. Dari perspektif ini, masyarakat Indonesia telah memasuki tahap *modern society* karena memiliki ciri-ciri organisasi negara berskala besar, modal dan media, struktur ketatanegaraan, birokrasi, dan piranti pasar; sebagian masyarakat sudah memasuki tahap *post-modern society* dengan ciri *destructuration* dan *deculturation* terhadap "product" *tradisional society*. *Chaotic* dan *anarchic* juga adalah ciri lain dari sebuah *post-modern society*. Namun, masih banyak penduduk yang hidup pada tahap *traditional society* terutama masyarakat perdesaan yang menekuni sektor pertanian; penduduk yang hidup pada tahap *primitive society* juga masih ada. Dalam hal ini, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki penduduk yang memenuhi kategori empat fase tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah eksistensi *social capital* sebagai sebuah "product" masa lampau masih dapat dipertahankan.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan peran dan pentingnya *social capital* dalam sebagai sebuah *piranti sosial (social equipments)* pada level komunitas, dan sekaligus menjawab pertanyaan mendasar seperti dikemukakan di atas. Secara spesifik artikel ini membahas secara kritis tentang *social capital* sebagai sebuah landasan pembangunan sosial pada level komunitas untuk konteks Indonesia. Analisis terhadap peranan *social capital* mendesak mengingat *policymakers* membutuhkan berbagai masukan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan sosial yang bertumpu pada kemampuan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara mandiri. Dengan artikel ini, diharapkan *social capital* sebagai

capital sebagai sebuah piranti sosial yang memang benar-benar telah berakar di masyarakat terutama pada level komunitas. Artikel ini juga diharapkan dapat menambah keyakinan kita bahwa *social capital* dapat direkayasa ulang asal dilakukan oleh anggota komunitas, sehingga peran dan pentingnya *social capital* dapat berkembang secara dinamis. Tugas *scholars, policymakers, practitioners* adalah memfasilitasi anggota komunitas agar mereka menyadari bahwa mereka memiliki piranti sosial sebagai sebuah harta sosial yang dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan mereka untuk semua aspek kehidupan, tentunya pada level komunitas.

2. DEFINISI DAN PENGERTIAN SOCIAL CAPITAL

Seorang *social development specialist* ternama dari Italy, Robert D. Putnam, pada tahun 1970 mengembangkan konsep *social capital* untuk memberikan argumentasi teoritis terhadap pertanyaan mengapa tindakan-tindakan kolektif mengalami kegagalan pada sejumlah komunitas, tetapi pada komunitas-komunitas lainnya mengalami keberhasilan. Berdasarkan hasil penelitiannya di Italy, faktor signifikan yang menentukan keberhasilan tersebut adalah *social capital*. *Social capital* dalam pandangan Putnam merujuk kepada suatu *feature* tentang organisasi sosial, seperti jaringan-jaringan kerja, norma-norma dan kepercayaan yang memfasilitasi terciptanya ko-ordinasi dan kooperasi bagi kepentingan bersama dalam sebuah komunitas.

Narayan and Woolcock (2000) kemudian mengembangkan definisi formal sederhana tentang *social capital*

yakni "norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang membuat orang bertindak secara kolektif." Dalam pandangan mereka, *social capital* dapat meningkatkan genefit investasi *physical capital* dan *human capital*. Dengan kata lain, tanpa adanya *social capital*, *Return On Investment* dari investasi harta fisik dan harta manusia tidak akan optimal, bahkan kontribusinya bagi kesejahteraan manusia tidak memiliki makna apa-apa. Inilah inti dari fungsi dan peran-an *social capital* dalam konteks pembangunan. Kegagalan pembangunan selama ini diduga disebabkan kurang mempertimbangkan *social capital* sebagai *independent variable*.

Ketika istilah *social capital* itu ditemukan, Putnam (1993) mempelajari 20 pemerintah daerah yang terhitung kuat yang didirikan di Italy tahun 1970. Beberapa dari sample pemerintahan tersebut mengalami kegagalan dalam menjalankan pemerintahannya; mereka bekerja tidak efisien, malas, dan korupsi. Sementara yang lain, berhasil dalam menciptakan program inovatif dan mengarahkan dan mengimplementasikan kebijakan. Putnam kemudian menemukan atribut *social capital* dalam komunitas yang berhasil. Dalam *social capital*, ternyata ada jaringan kerja hubungan sosial. Komunitas dengan jaringan kerja sosial yang kental dapat dipastikan memiliki *social capital* yang kuat; sementara komunitas yang lemah jaringan kerja sosialnya berarti *social capital* juga lemah. Soliditas jaringan kerja *social capital* semakin kuat dengan semakin meningkatnya partisipasi orang dalam jaringan kerja sosial, semakin besar proporsi anggota komunitas dalam jaringan kerja sosial, dan semakin tumpang-tindih jaringan kerja

sosialnya, sehingga terbentuklah keterkaitan antar anggota dalam sebuah komunitas.

Ada sejumlah bukti empiris tentang kontribusi *social capital* dalam kehidupan bermasyarakat di beberapa negara. Terbukanya akses pada *social capital* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga (Boisjoly *et al.*, 1995). Sebaliknya, hilangnya *social capital* dan gersangnya warna kehidupan komunitas, dapat menimbulkan *emotional disorder* (Maher, 1992) dan bahkan dapat menimbulkan kejahatan (Bellair, 1997). Cullen (1994) berpendapat lemahnya pengawasan sosial, keterlibatan individu dalam kejahatan, dan tingkat kejahatan, mempunyai korelasi dengan dukungan sosial—yaitu ketersediaan jaringan kerja sosial yang menyediakan sumber-sumber perlindungan bagi warga masyarakat.

Cullen (1994) juga mengemukakan bahwa dengan meningkatnya dukungan sosial dalam komunitas, tingkat kejahatan menurun. Komunitas-komunitas yang menjaring warganya dengan ikatan-ikatan atas dasar saling kepercayaan, empati dan tanggung jawab, akan melindungi mereka dari kejahatan sosial (Braithwaite, 1989; Cullen, 1994; Messner and Rosenfeld, 1994). Selanjutnya, Chamlin and Cochran (1997) berpendapat bahwa tingkat kejahatan akan menurun dalam komunitas-komunitas yang mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, cukup bukti menunjukkan bahwa *social capital* merupakan sebuah harta sosial yang patut dipelihara secara bijaksana, karena kontribusinya demikian baik bagi masyarakat.

Jika *social capital* meningkat dengan meningkatnya jumlah orang yang berpartisipasi dalam asosiasi informal dan jaringan-jaringan kerja sosial (*networks*), maka anggotanya dapat memberikan kontribusi kepada *social capital* komunitas mereka, biasanya dengan cara-cara berpartisipasi dalam perkumpulan olahraga, organisasi rekreasi, kelompok rukun tetangga dan rukun warga, organisasi keagamaan, asosiasi orangtua murid dan guru, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, organisasi lanjut usia, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa kinerja *social capital* tergantung pada partisipasi aktif anggotanya: ikut bermain dalam sebuah tim, bukan hanya menyaksikan acara olahraganya; bergabung dalam kelompok paduan suara komunitas, bukan hanya menghadiri acara konsernya; ikut terlibat dalam arisan warga bukan hanya terdaftar sebagai peserta arisan warga; dan terlibat langsung dalam sebuah kegiatan ritual keagamaan di tempat peribadatan lokal, bukan hanya sering bepergian ke tempat-tempat peribadatan yang megah tetapi berada di luar wilayah tempat tinggalnya.

3. PERANAN SOCIAL CAPITAL DARI DIMENSI TEORITIS

Dalam lima tahun terakhir terjadi perkembangan menarik di Indonesia di mana ada kesepakatan tak-tertulis antara tiga pihak, yakni *scholars, policymakers, practitioners* dari berbagai disiplin ilmu, yang mengakui peranan dan betapa pentingnya lembaga (*institutions*) dan komunitas (*communities*) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Adanya kooperasi dan dialog di antara mereka bukan suatu kebetulan, tetapi karena terdorong oleh bermunculannya bukti-

munculannya bukti-bukti hasil penelitian di sejumlah negara di dunia termasuk di Indonesia oleh para ahli Barat yang menunjukkan bahwa hubungan sosial (*social relationships*) yang terjalin dalam lembaga dan komunitas mempunyai implikasi penting bagi pembangunan ekonomi. Hubungan sosial (*social relationships*) dengan berbagai pola berbeda-beda—tergantungan pada daerah dan latar belakang sosial budaya komunitas—disebut *social capital* atau *harta sosial*.

Konseptualisasi peranan hubungan sosial dalam pembangunan menjadi titik tolak penting dari perkembangan pendekatan-pendekatan teori terakhir, karena hingga tahun 1990-an teori pembangunan masih berpandangan sempit, bahkan kontradiktif terhadap peranan hubungan sosial dalam pembangunan ekonomi. Apabila disimak lebih ke jauh ke belakang, pada tahun 1950-an dan 1960-an misalnya, hubungan sosial tradisional dan pola hidup tradisional oleh sejumlah ahli dianggap menghambat pembangunan. Akibatnya, pada masa Pemerintahan Orde Baru para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di Indonesia misalnya, demikian terpengaruh sehingga menganggap penting untuk mengembangkan program-program yang tujuannya untuk mengeliminasi tradisi dan adat istiadat yang dianggap dapat menghambat implementasi sebuah proyek pembangunan. Bahkan hingga sekarang masih banyak kalangan ahli yang menganggap bahwa adat-istiadat dan tradisi yang ada pada hampir semua kelompok etnis di Indonesia dianggap menghambat kemajuan. Pandangan kurang tepat tersebut mungkin sekali dipengaruhi oleh pendapat Moore (1997), seorang *modernizations theorist*, yang mencatat bahwa

social relations sebagai biangkeladi kegagalan kapitalisme di sejumlah negara berkembang.

Pada tahun 1970-an teorisi-teorisi ketergantungan dan sistem berpendapat bahwa hubungan sosial di antara elite pengusaha dan politik-us merupakan sebuah mekanisme penting dari keberhasilan eksploitasi kapitalisme terhadap negara-negara berkembang. Mereka juga melihat bahwa karakteristik sosial negara miskin dan komunitasnya dinilai secara eksklusif dalam bentuk kepentingan pemodal terhadap tenaga kerja. Sementara itu, sedikit sekali yang menyinggung hubungan saling menguntungkan antara buruh dengan majikan untuk kepentingan kesejahteraan buruh. Sejalan dengan itu, teorisi *neoclassical* dan *public choice* pada tahun 1980-an dan 1990-an, mengindikasikan tidak ada faedah konkrit dari hubungan sosial terhadap pembangunan ekonomi. Namun pada saat bersamaan, sejumlah teorisi pembangunan mulai berani mengemukakan penilaian objektifnya bahwa selama ini hubungan sosial (*social relations*) terlalu didiskreditkan, dipojokkan, dieksploitasi, dianggap tidak relevan dan tidak bermakna.

Untuk melihat peranan dan pentingnya *social capital* pada level komunitas, ada beberapa perspektif yang dapat dijadikan kerangka berpikir untuk mempermudah melihat *social capital* sebagai sebuah subjek, karena perspektif ini mampu memosisikan *social capital* dalam konteks kepentingan yang netral. Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan *social capital* dengan pembangunan ekonomi, Woolcock and Narayan (2000) mengkategorikan *social capital* ke dalam empat perspektif: *communi-*

tarian view, networks view, institutional view, synergy view.

Communitarian perspective sering dan biasanya menghubungkan pandangannya dengan sejumlah organisasi lokal seperti *clubs, associations, dan civic groups*. *Networks perspective* memperbincangkan *advantage dan disadvantage*, dan menekankan pentingnya asosiasi vertikal maupun horizontal antar-orang dalam hubungannya dengan dan antar entitas organisasi seperti *community groups dan firms*. *Institutional perspective* berpendapat bahwa vitalitas *community networks dan civil society* merupakan "product" lingkungan politik, hukum, dan institusional. Sedangkan *synergy perspective* berupaya mengintegrasikan bekerjanya dua buah kekuatan yang menggeliat dari dua perspektif yang berbeda yakni *networks dan institutional*. Artikel ini tidak mengkaji perbedaan empat perspektif terhadap *social capital*, tetapi mendeskripsikan *communitarian view* tentang *social capital* dalam kaitan dengan perannya pada level komunitas dengan definisi yang telah diuraikan di atas. Keempat perspektif tersebut sama-sama penting dalam melihat *social capital* sebagai salah satu dimensi yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan yang biasanya diimplementasikan dalam bentuk investasi fisik dan investasi manusia.

Dari definisi dan pengertian tentang *social capital, communitarian view* dapat menjadi dasar asumsi bagi pemerintah dalam mempromosikan *social capital* sebagai sebuah alat sekaligus potensi atau *piranti sosial* bagi lembaga dan komunitas untuk menuju suatu masyarakat sejahtera dan harmonis. *Communitarian perspective* menempatkan lembaga dan komunitas

sebagai *assets* yang memiliki peranan penting dalam pemeliharaan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera. Perspektif ini memandang *social capital* sebagai *independent variable*, sedangkan kesejahteraan sosial komunitas dipandang sebagai *dependent variable*. Dengan demikian, tentu saja fluktuasi yang terjadi pada *independent variable (social capital)*—disebabkan faktor internal maupun eksternal—dapat mempengaruhi *dependent variable* (kesejahteraan). Dari pengertian ini, upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi peningkatan kinerja *social capital* sehingga menghasilkan *output* kesejahteraan sosial komunitas.

Perspektif ini juga melihat kesejahteraan sosial sebagai *outcome* lembaga dan komunitas di mana *social capital* sebagai *software* bekerja. Oleh karena itu, program konkrit pemerintah dilihat dari *communitarian perspective* adalah bukan mengembangkan kesejahteraan sosial—karena ia adalah *outcome*—tetapi memfasilitasi lembaga dan komunitas supaya *social capital* mereka berfungsi secara dinamis, dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga *social capital* bekerja menghasilkan kesejahteraan sosial komunitas. Salah satu sebab mengapa sering ditemukan kegagalan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah kesalahan menetapkan *outcome* menjadi subjek intervensi, seharusnya *social capital* sebagai *dependent variable* sehingga menjadi sasaran.

Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa perspektif komunitarian dapat dijadikan landasan penting bagi pemerintah apabila paradigma pembangunan kesejahteraan sosial misal-

nya memandang masyarakat—yang merupakan agregat dari lembaga dan komunitas—secara relatif memiliki tanggung jawab sosial yang sama terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana diwujudkan dalam visi Departemen Sosial: “Kesejahteraan Sosial Dari, Oleh, dan Untuk Semua.”

4. PERANAN SOCIAL CAPITAL DARI DIMENSI EMPIRIS

Sejumlah bukti empiris yang diprakarsai oleh sejumlah *social development specialists* seperti Coleman (1987, 1988, 1990) tentang pendidikan, Putnam (1993, 1995) tentang partisipasi warga dan kinerja lembaga, Dordick (1997) tentang masalah kemiskinan, Rubio (1977) tentang *productive social capital versus perverse social capital*, Narayan and Nyamwaya (1996) tentang *participatory poverty assessment*, World Bank (1989) tentang kooperasi dan kelompok tani, dan Narayan (1999) tentang solidaritas sosial penduduk pribumi, semuanya menunjukkan bahwa *social capital* memberikan dukungan empiris sangat besar bagi penyusunan *policy prescription* yang komprehensif dan koheren. Ikatan sosial dalam lembaga dan komunitas (*community ties*) tersebut tercermin dalam norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang membuat orang atau anggota bertindak secara kolektif, yang dikenal dengan *social capital* atau *harta sosial*.

Social capital dalam *communitarian view* secara inheren dinilai sangat baik, semakin banyak norma, jaringan kerja dan kepercayaan semakin baik, dan eksistensinya selalu mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan suatu lembaga dan komunitas. Bila soliditas lembaga dan komuni-

tas semakin kuat, maka semakin kuat sebuah masyarakat atau bangsa. Perspektif ini menilai bahwa *social capital* memberikan kontribusi penting bagi analisis kemiskinan, karena mendorong pihak-pihak yang melakukan intervensi untuk lebih fokus kepada sentralitas ikatan-ikatan sosial (*social ties*) dalam pemberdayaan orang miskin mengelola risiko dan kerentanan. Dari perspektif ini, kembali ditegaskan bahwa *social capital* dapat dipandang sebagai *independent variable* yang mampu memberikan berbagai *outcomes* positif bagi kepentingan lembaga dan komunitas. Macam-macam *outcomes* dari *social capital* dapat diidentifikasi, a.l., kesejahteraan sosial, integrasi sosial, pembangunan berkelanjutan, dan reduksi kemiskinan, perdamaian, dan efisiensi ekonomi, dan manajemen sumberdaya lokal secara kolektif.

Ilustrasi berikut kiranya dapat membantu pemahaman lebih dalam tentang perspektif *social capital* dalam konteks kesejahteraan sosial masyarakat. Seseorang dalam sebuah keluarga, pertemanan, dan perkumpulan, lembaga menjadi sebuah *social assets*. Orang yang terikat dalam *social assets* dari sebuah lembaga dan komunitas tentu dapat memanfaatkan *asset* yang dimilikinya ketika menghadapi kesulitan, mendayagunakannya untuk kesejahteraan, dan dipakai untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu, komunitas yang mewarisi beragam cadangan jaringan-kerja sosial (*social networks*) dan perkumpulan kewargaan (*civic association*), biasanya berada dalam posisi yang lebih baik dalam mengentaskan kemiskinan dan kerentanan (Moser, 1996; Narayan, 1995), memecahkan perselisihan (Schafft, 1998; Varshney, 2000), dan

mengambil faedah dari peluang-peluang baru (Isham, 1999). Sebaliknya, absennya *social ties* dalam *social capital* sebuah lembaga dan komunitas dapat berdampak terbalik yang setara. Dengan ilustrasi ini, tidak ada alasan lagi bagi pihak manapun untuk mengemukakan bahwa *social capital* komunitas merupakan penghambat pembangunan di Indonesia. Sebaliknya, *social capital* perlu dilihat sebagai sebuah harta sosial yang perlu diinkorporasikan ke dalam perencanaan pembangunan kalau investasi *physical capital* dan *human capital* ingin menghasilkan *outcome* yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Kemudian, *feature* miskin dalam perspektif *social capital* terjadi karena seseorang tidak menjadi anggota dari *social networks* dan lembaga di mana lembaga itu sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menjamin pekerjaan dan tempat yang aman (Wilson 1996). Implikasi penting dari pemikiran ini adalah keanggotaan seseorang dalam sebuah lembaga atau komunitas, menjadi penting karena mekanisme *social capital* akan melindunginya dari risiko dan kerentanan.

Dalam sebuah negara *welfare state* di mana warga negaranya tidak menjadi anggota *social security* seperti *pension scheme* dan *health insurance*, maka ancaman risiko dan kerentanan sangat besar. *Social security system* yang dikembangkan negara bisa dipandang sebagai *social capital* raksasa yang dibangun negara untuk melindungi warga negara secara nasional. Sebaliknya, dalam sebuah negara yang menganut sistem *welfare society* di mana tidak terdapat *social security*, maka keanggotaan seseorang dalam sebuah *social capital* komunitas menjadi sangat berarti bagi kelangsungan

kehidupannya. Oleh karena itu, di satu pihak upaya pemerintah adalah bagaimana membantu memfasilitasi agar *social capital* terus berkembang secara dinamis, sementara di lain pihak pemerintah juga harus melakukan promosi agar warga masyarakat masuk ke dalam jaringan-jaringan kerja tersebut sebagai anggotanya.

Beranjak dari *communitarian view*, *social capital* memiliki peranan penting bagi masyarakat Indonesia karena tiga alasan penting. Pertama, masyarakat majemuk dan tinggal tersebar, sangat rentan terhadap disintegrasi sosial. Kesenjangan ekonomi bisa memicu kecemburuan sosial dan konflik sosial. Mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial budaya dan tingkat kesejahteraan yang berbeda ke dalam konsep *bhineka tunggal ika*, sulit terwujud bila tidak memiliki ikatan sosial (norma-norma dan jaringan-jaringan kerja) yang disebut *social capital*. Kedua, bagi negara yang tidak memiliki *social security*, *social capital* menjadi alternatif terakhir untuk melindungi penduduk miskin. Ketiga, bentuk-bentuk kepedulian sosial individual, akan lebih efektif bila dimobilisasi melalui lembaga dan komunitas di mana *social capital* bekerja.

Pada tahun 2001, penulis melakukan *policy research* dengan judul "Kajian Kesejahteraan sosial Masyarakat: Studi Kasus Terhadap Masyarakat Bali-Betawi." Tujuan riset ini untuk mendukung kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Secara spesifik, riset ini menjawab pertanyaan mengapa masyarakat Bali dan Betawi bisa menunjukkan koeksistensinya dalam kehidupan masyarakat megapolitan. Hasil riset menunjukkan masyarakat Bali memiliki *social capital*

yang kuat karena didukung sistem "banjar." Sedangkan masyarakat Betawi mampu mempertahankan koeksistensinya karena ajaran Islam menjadi acuan dalam *social capital* komunitasnya.

Baru-baru ini penulis melakukan riset ke Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, di Kabupaten Sodoardjo, karena Desa ini diketahui mampu memelihara perdamaian pasca konflik antar-etnis tanggal 12 Januari 2001. Pada waktu itu, hampir terjadi konflik sosial besar antar-etnis di desa tersebut yang dipicu oleh meninggalnya seorang pedagang sayur warga desa Durung Bedug yang biasa berjualan di Pasar Larangan oleh seorang preman etnis-M. Karena warga Desa Durung Bedug tidak bisa menerima perbuatan tersebut, akhirnya ratusan warga Desa Durung Bedug dengan membawa berbagai perlengkapan perang tradisional mendatangi Desa Larangan untuk membalas penganiayaan atas warganya. Kepala Desa Tenggulunan dengan aparatnya dan tokoh masyarakat serta warganya berupaya mencegah konflik tersebut dengan menjelaskan duduk persoalan sebenarnya kepada warga Desa Durung Bedug yang sudah siap menghadang siapapun warga etnis-M yang tinggal di Desa Larangan. Akhirnya, niat warga Desa Durung Bedug untuk melampiaskan napsunya urung disebabkan kekompakan warga Desa Larangan yang dipimpin Kepala Desa untuk mencegah konflik tersebut.

Dari hasil riset diketahui terdapat suatu jaringan kerja dan norma serta kepercayaan yang baik di antara warga dalam bentuk kegiatan sosial seperti Jami'ah Tahlil untuk orangtua, Jami'ah Tibaan untuk kalangan remaja, dan Jami'ah Yasin'an untuk remaja putri, kegiatan arisan, kerja

bhakti desa, dan lain-lain. Jaringan kerja, norma dan kepercayaan yang terbentuk melalui kegiatan tersebut adalah *social capital*. Dengan demikian, karena soliditas *social capital* yang baik, konflik antar-etnis di desa tersebut tidak terjadi.

Penulis juga melakukan observasi di kota Mataram baru-baru ini untuk melihat mengapa dua kelompok etnis yang pernah bertikai bisa memelihara perdamaian pada pasca konflik antar-etnik pertengahan tahun 2001. Di sebelah utara Kota Mataram pada pertengahan tahun 2001 terjadi "perang terbatas" antar-warga Desa Taliwang dengan warga Desa Toh Pati disebabkan salah pengertian antara kedua warga desa dengan latar belakang etnis yang berbeda (etnis-B dengan etnis-S) pada saat terjadi upacara peribadatan warga etnis-B. Namun karena kesigapan Kepala Desa, kedua tokoh masyarakat yang bertikai, aparat keamanan, dan warga kedua desa tersebut dalam mencegah konflik, akhirnya konflik tersebut tidak meluas. Kedua warga yang bertikai akhirnya mencapai kesepakatan untuk membuat Pos Pengaman yang sifatnya permanen yang diisi oleh aparat kepolisian, untuk mencegah segala kemungkinan. Sementara itu, tokoh masyarakat dari kedua belah pihak membangun jaringan komunikasi intensif untuk mencegah terulangnya peristiwa menamatkan tersebut. Untuk sementara waktu, hingga sekarang tidak pernah terdengar kembali gejala-gejala konflik sosial tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan kepemimpinan tokohnya, dapat membangun sebuah *social capital* baru bila mereka menghendaki.

Berdasarkan hasil observasi penulis, dewasa ini di Kabupaten Lombok

Timur tengah terjadi ketegangan sesama warga muslim disebabkan dua orang putri Tuan Guru—tokoh ulama paling disegani dan dihormati masyarakat muslim Lombok—karena sepeninggal ayahnya kedua putri pewaris ulama perguruan Islam paling berpengaruh tersebut masing-masing membangun kekuatan untuk mendapatkan jemaah sebanyak-banyaknya. Ketegangan antara kedua pimpinan massa ini dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial sesama mereka. Ketegangan sosial ini nampaknya terjadi karena adanya kerusakan jaringan-jaringan kerja, norma-norma, dan kepercayaan antar-anggota komunitas. Anggota komunitas yang dahulu merupakan kesatuan, sekarang terpecah ke dalam dua komunitas dengan berbeda kepentingan. Tali silaturahmi yang selama ini dibangun oleh Tuan Guru bagi kepentingan umat, terputus disebabkan terjadinya dekonsentrasi kepemimpinan mereka.

Di Kabupaten Lombok Timur juga dewasa ini tengah terjadi ketegangan sosial di mana warga masyarakat pengikut ajaran Ahmadiyah, mendapat tekanan dari masyarakat Lombok Timur untuk hengkang dari bumi Lombok. Ketegangan ini muncul disebabkan tidak terjadinya putus tali silaturahmi antara pengikut ajaran Ahmadiyah dengan warga Muslim Lombok pada umumnya. Adanya pengelompokan warga Muslim ke dalam ajaran baru tersebut menyebabkan lunturnya jaringan kerja, norma, dan kepercayaan di antara kedua warga Muslim dari ajaran yang berbeda. Dengan kata lain, *social capital* yang selama ini mereka hayati dan diterapkan karena adanya persamaan kepercayaan, soliditasnya melemah

atau hancur disebabkan perbedaan kepentingan.

Dikaitkan dengan bukti-bukti empiris di atas, menunjukkan bahwa eksistensi *social capital* pada level komunitas ternyata masih terpelihara. Bahkan bukti-bukti empiris itu menunjukkan bahwa *social capital* masih berfungsi. Di sejumlah negara, *social capital* bahkan mampu mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. *Social capital* juga mampu mencegah konflik, mengembangkan rekonsiliasi konflik, dan memelihara perdamaian. Di Amerika Serikat, *social capital* ternyata berkembang dengan baik, bahkan masyarakat mampu mengembangkannya disesuaikan dengan keadaan. Indonesia dengan mayoritas masyarakat tradisional, fungsi *social capital* seharusnya lebih kuat.

Jadi, apabila ada anggapan sementara orang bahwa *social capital* telah punah sejalan dengan perkembangan sejarah kehidupan manusia (*human history*), pendapat semacam itu mungkin tidak didukung oleh data hasil penelitian empiris dari lapangan. Di lain pihak, bila masih ada yang menilai bahwa *social capital* sudah tidak berfungsi, pandangan semacam ini disebabkan indikator *social capital* yang digunakan untuk mengukurnya mungkin tidak sudah relevan lagi dengan fase perkembangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bila ada pihak-pihak yang berupaya memberdayakan *social capital* sebagai harta sosial atau piranti sosial untuk mengembangkan kesejahteraan sosial masyarakat, atau untuk kepentingan yang lebih besar seperti pembangunan ekonomi dan lain sebagainya, perlu didukung sepenuhnya agar tidak berhenti sebatas wacana untuk pemenuhan kepuasan kaum intelektual.

5. INDIKATOR SOCIAL CAPITAL

Untuk mendukung sebuah kebijakan pengayaan *social capital*, diperlukan penelitian komparatif dengan berbagai ukuran *social capital* di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk menguji adanya keragaman "di dalam-daerah" dan "antar-daerah" dalam mereduski kemiskinan, peningkatan kinerja pemerintah, manajemen konflik sosial, kepedulian sosial, pemeliharaan perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi. Sebab bila hanya menggunakan satu ukuran *social capital* untuk lembaga dan komunitas yang berbeda geografisnya, akan sulit dipakai bagi komunitas yang lebih luas terutama di Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, definisi paling komprehensif *social capital* sangat multidimensional karena menggabungkan banyak level dan unit analisis yang berbeda. Kedua, hakekat dan bentuk *social capital* senantiasa berubah sepanjang waktu sejalan dengan keseimbangan hubungan *informal-formal organization*. Ketiga, mungkin tidak tersedia suatu *survey cross-country longitudinal* di Indonesia yang dirancang untuk mengukur *social capital*, kita mungkin hanya mampu mengkompilasikan *Social Capital Index (SCI)* yang telah diformulasi oleh pihak lain. Keempat, *social capital* bisa berbeda-beda tergantung pada daerah dan latar belakang etnis dari lembaga dan komunitas.

Uraian berikut adalah sejumlah indikator *social capital* sebagai referensi bagi perumusan indikator *social capital* di Indonesia: kepercayaan, kecenderungan voting untuk mengambil keputusan penting, mobilitas sosial. Sejumlah studi berhasil mengidentifikasi hal-hal berikut: keanggotaan dalam asosiasi informal dan for-

mal, tolong-menolong, pesta olahraga lokal, dan upacara adat tradisional, merupakan indikator *social capital*. Sementara itu, berdasarkan hasil survey Deepa Narayan (1997) terhadap sejumlah rumah tangga di sejumlah daerah perdesaan Tanzania, Narayan and Pritchett (1999) mengembangkan gagasan *Social Capital Index (SCI)* untuk level rumah tangga dan komunitas. Dimensi SCI tersebut adalah: keberfungsian kelompok, kontribusi finansial dan natura bagi kelompok, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan heterogenitas keanggotaan. Dengan semakin besar kontribusi keempat indikator tersebut bagi lembaga atau komunitas, semakin kuat soliditas *social capital*, dan makin tinggi kesejahteraan sosial lembaga atau komunitas. Dengan semakin heterogennya keanggotaan sebuah lembaga atau komunitas, maka keragaman anggota membentuk toleransi yang tinggi.

Studi terhadap institusi-institusi lokal di Bolivia (Grootaert and Narayan, 2000), Burkina Faso (Grootaert Oh, and Swamy, 1999), dan Indonesia (Grootaert, 1999), diketahui ada dimensi yang berbeda tentang *social capital* pada level rumah tangga dan komunitas, tetapi sama-sama memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan rumah tangga, dan merupakan *capital* bagi penduduk miskin. *Variable* tersebut adalah kekentalan hubungan, heterogenitas keanggotaan dalam asosiasi, dan tingkat partisipasi aktif mereka dalam asosiasi.

Manifestasi lain dari *social capital* seperti diungkapkan Francis Fukuyama (1995), adalah "norma-norma dan nilai-nilai yang memfasilitasi lembaga dan komunitas untuk melakukan perubahan, menekan biaya transaksi

mengurangi biaya informasi, membolehkan perdagangan tanpa kontrak, dan menggugah tanggung jawab warga dalam pengelolaan sumber daya secara kolektif. Berdasarkan data *World Values Survey* tentang *social capital*, sejumlah ahli ekonomi menemukan nilai-nilai *social capital* dalam bentuk *trust*. Sementara itu, Knack and Keefer (1997) dengan menggunakan data *World Survey Values* tersebut menyimpulkan adanya korelasi positif antara *trust* dengan tingkat investasi di sebuah negara. Sebuah negara di mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat lemah dapat mengurangi minat sebuah negara investor melakukan investasinya di sebuah negara.

Masih ada hasil studi lain yang mengembangkan SCI seperti di Amerika Serikat, *The National Commission on Philanthropy and Civic Renewal* (1998), berhasil mengembangkan *National Index of Civic Engagement*. Indeks ini menekankan pada lima dimensi pokok, yakni: giving climate, community engagement, charitable involvement, the spirit of voluntarism, dan active citizenship. Negara-negara di mana masyarakatnya memiliki karakteristik tersebut, kuat *social capital*-nya.

Dalam sebuah eksplorasi sosial terhadap akar konflik Hindu-Muslim di India, Varshney (2000) menemukan peranan *intercommunal networks*. Bagi kota-kota di mana interaksi Hindu-Muslim rendah, hanya sedikit tersedia saluran-saluran untuk resolusi damai bagi bahaya *latent communal conflict*, dan justru secara periodikal terjadi pertikaian; bagi kota-kota di mana keanggotaan asosiasi saling *overlap* dan interaksi sehari-hari intensif, konflik dapat diantisipasi dan di disipasi.

Hasil Varshney ini membuktikan diversitas menjadi sumber kekuatan bila *social ties* melintasi batas-batas komunitas berbeda.

Untuk menilai *social capital* pada level individu, Onyx and Bullen (2000) berhasil mengembangkan delapan SCI individu, yakni: partisipasi dalam komunitas lokal, proaksi dalam konteks sosial, memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan rasa aman, memiliki koneksi kuat dengan tetangga, memelihara silaturahmi dengan sanak-keluarga dan teman, toleran terhadap diversitas, hidup lebih bermakna, memiliki koneksi kerja. SCI individu dapat memprediksi sejauh mana kekentalan *social capital* komunitas. Semakin lengkap unsur *social capital* individu, semakin baik kekentalan *social capital*, semakin besar kontribusinya bagi kesejahteraan sosial komunitas. Indikator *social capital* tersebut dapat menjadi referensi untuk pengembangan sebuah *instrument* untuk mendiagnosis piranti sosial komunitas di Indonesia.

6. IMPLIKASI BAGI TEORI, RISET DAN KEBIJAKAN

Dengan diketahuinya peran dan pentingnya *social capital* sebagai piranti sosial komunitas, maka inkorporasi konsep *social capital* ke dalam kebijakan di Indonesia menjadi mendasak. Selama ini kebijakan pembangunan terlalu memfokuskan pada dimensi ekonomi. Untuk intervensi reduksi kemiskinan pada komunitas miskin pada masyarakat heterogen memang sulit. Oleh karena itu, perhatian pada *social capital* saja tidak cukup, sehingga kemiskinan dan komunitas miskin masih tetap menjadi tantangan besar bagi pembangunan. *Social capital* bukan satu-satunya jawaban mem-

cahkan kemiskinan. *Social capital* sebuah piranti sosial yang dapat membantu komunitas miskin mencegah risiko dan kerentanan, bila *social capital* mereka diperhitungkan. Dengan demikian, dari perspektif komunitarian, bantuan teknik dan finansial memang penting, tetapi bukan kondisi yang memadai bagi pemberdayaan komunitas miskin. Sementara itu, untuk mengatasi konflik sosial, *social capital* dapat menjadi piranti sosial bagi mengembangkan saling pengertian dan toleransi sehingga anggota komunitas dapat mengembangkan tali silaturahmi lintas-komunitas.

Sehubungan dengan itu, sangat kritikal untuk melakukan investasi sosial terhadap kapasitas kelembagaan komunitas miskin untuk membantu mereka membangun jembatan dengan kelompok sosial lainnya. Intervensi pembangunan sebaiknya dilihat melalui lensa *social capital*, dan memperhitungkan dampaknya terhadap *social capital*. *Social capital* komunitas miskin adalah sumber primer yang mereka miliki untuk dalam mengelola risiko dan kerentanan, dan oleh karenanya pihak-pihak luar perlu mencari cara-cara untuk mengkomplemenkan sumber-sumber tersebut.

Bila komunitas miskin mempunyai akses langsung kepada perencanaan, implementasi, pengelolaan, dan evaluasi sebuah proyek, *returns on investments* dan kelangsungan proyek dapat terjamin. Agar *social capital* lembaga atau komunitas memiliki peran sosial dalam pencegahan dan resolusi konflik sosial, pemeliharaan perdamaian, dan peningkatan kesejahteraan sosial, maka anggota lembaga dan komunitas harus selalu memperoleh informasi tentang kondisi objektif masyarakat, melalui proses

pendidikan dan pelatihan melalui jalur formal dan informal.

Ada empat pendekatan yang dapat dipertimbangkan oleh *administrative agencies* dalam mengembangkan kebijakan untuk mendorong keberfungsian *social capital* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial komunitas. Pertama, *pendekatan kekuasaan (authoritative techniques)* di mana implementasi kebijakan didasarkan pada asumsi bahwa tindakan orang perlu diatur dan diawasi oleh pemerintah sehingga dapat mencegah atau mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang tidak aman, tidak adil, jahat, dan amoral. Kedua, *pendekatan insentif (incentive techniques)* di mana implementasi kebijakan didasarkan pada asumsi bahwa orang umumnya memiliki sifat *utility maximizers* yang bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi mereka dan oleh karenanya perlu memberikan keringanan atau pembebasan (*payoff*) atau bahkan penghargaan (*financial inducements*) bagi yang mematuhi kebijakan pemerintah. Ketiga, *pendekatan kapasitas (capacity techniques)* di mana implementasi kebijakan didasarkan pada asumsi bahwa orang memerlukan informasi, pendidikan, pelatihan, atau fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Keempat, *pendekatan himbauan (hortatory techniques)* di mana implementasi kebijakan didasarkan pada asumsi bahwa orang perlu didorong untuk mematuhi kebijakan pemerintah dengan memotivasi mereka untuk memiliki "better instincts" dalam suatu upaya agar mereka bertindak sesuai dengan cara yang dianjurkan pemerintah. Keempat pendekatan tersebut sebaik-

nya dilakukan secara simultan sehingga mencapai efektivitas maksimal.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Masih *premature* menyimpulkan bahwa azas keseimbangan antara dimensi ekonomi dan dimensi sosial telah terbentuk di Indonesia. Akan tetapi cukup alasan untuk mengatakan bahwa "konsensus tak-tertulis" telah muncul bahwa hubungan sosial (*social relationships*) penting dalam pembangunan. Telaahan teoritis dan bukti empiris seperti disajikan di atas tentang *social capital* sebagai sebuah piranti sosial pada level komunitas menunjukkan bahwa hubungan sosial menyediakan peluang untuk memobilisasi sumber-sumber yang ada pada masyarakat. Dimensi empiris mendukung argumen bahwa *social capital* dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lembaga atau komunitas. *Social capital* dapat berfungsi dengan baik dengan absennya mekanisme asuransi formal dan instrumen finansial. Penggunaan koneksi sosial oleh warga komunitas miskin untuk melindungi mereka dari risiko dan kerentanan, merupakan sebuah contoh konkrit peranan *social capital* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial individu pada level komunitas.

Riset mengenai *social capital* di Indonesia masih terbatas, tetapi *policymakers* dan *practitioners* tidak bisa menunggu para peneliti sampai memperlihatkan eksistensi *social capital* di Indonesia. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan sebaiknya segera saja melakukan *action research* terhadap *social capital* komunitas karena *social capital* penting bagi komunitas.

Dari perspektif komunitarian, *social capital* dipandang sebagai *independent variable*, sedangkan harmoni, perdamaian, kesejahteraan sosial, dan lain-lain adalah *dependent variable*. Fluktuasi yang terjadi pada *social capital* berpengaruh terhadap kesejahteraan komunitas. Masih banyak *outcome* lain dari *social capital*, tergantung pada komitmen anggota lembaga dan komunitas untuk mengembangkan jangkauan *social capital* sebagai piranti sosial komunitas. Yang jelas bahwa *social re-engineering* terhadap *social capital* oleh anggota komunitas sendiri sangat memungkinkan, sebab apabila tidak peranan dan fungsi *social capital* akan ditelan perubahan sosial.

Langkah-langkah strategis berikut dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebijakan peningkatan peran *social capital* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial individu pada level komunitas: (1) melakukan survey pemetaan sosial tentang *social capital* pada komunitas; (2) berdasarkan hasil studi sebelumnya di sejumlah negara di dunia, sudah sejumlah indikator *social capital* dapat menjadi acuan bagi penyusunan *instruments* pemetaan sosial dimaksud; dan (3) sebuah *Research Proposal* tentang "Social Mapping of Indonesian Social Capital Index" perlu diajukan kepada lembaga donor internasional untuk mendapat dukungan dana dan teknik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellair, P.E., 1997. "Social Interaction and Community Crime: Examining the Importance of Neighbor Networks". *Criminology*, 35(4), 677.

- Boisjoly, J., Duncan, G.J., and Hofferth, S. 1993. "Access to Social Capital." *Journal of Family Issues*, 16(5), pp.609-631.
- Braithwaite, J., 1989. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Coleman, James. 1987. "Norms as Social Capital." In Gerard Radnitzky and Peter Bernholz, eds., *Economic Imperialism: The Economic Method Applied Outside the Field of Economics*. New York: Paragon House Publishers.
- _____. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital." *American Journal of Sociology* 94(Supplement): S95-S120.
- _____. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Chamlin, M.B., and Cochran, J.K., 1997. "Social Altruism and Crime." *Criminology*, 35(2), 203-227.
- Cullen, F.T., 1994. "Social Support as an Organizing Concept for Criminology." *Justice Quarterly*, 11, 527-559.
- Dordick, Gwendolyn. 1997. *Something Left to Lose: Personal Relations and Survival among New York's Homeless*. Philadelphia, Pa.: Temple University Press.
- Fukuyama, F., 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Galtung, J., 2000. "On the Social Costs of Modernization: Social Disintegration, Atomie/Anomie and Social Development," dalam Cynthia Hewitt de Acantara (ed.), *Social Futures, Global Visions*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Grootaert, Christian, Gi-Taik Oh, and Anand Swamy. 1999. "Social Capital and Development Outcomes in Burkina faso." Working Paper 7. World bank, Social Development Department, Washington, D.C.
- Grootaert, Christian. 1999. "Social Capital, Household Welfare, and Poverty in Indonesia." Local Level Institutions Working Paper 6. World Bank, Social Development Department, Washington, D.C.
- Grootaert, Christian, and Deepa Narayan. 2000. "Local Institutions, Poverty, and Household Welfare in Bolivia." Working Paper 9. World Bank, Social Development, Washington, D.C.
- Isham, Jonathan. 1999. "The Effects of Social Capital on Technology Adoption: Evidence from Rural tanzania." *American Economic Society*. New York.
- Isham, Jonathan, Deepa Narayan, and Lant Pritchett. 1995. "Does participation Improve Performance? Establishing Causality with Subjective Data." *The World Bank Economic Review* 9(2): 175-200.
- Knack, Stephen, and Philip Keefer. 1995. "Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures." *Economics and politics* 7(3): 207-27.
- Maher, T.F., 1992. "The Withering of Community Life and the Growth of Emotional Disorders." *Journal of Sociology and Social Welfare*, 19(2), 125-146.
- Messner, S.F., and Rosenfeld, R., 1994. *Crime and the American Dream*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Moore, Mick. 1997. "Societies, Policies, and Capitalists in Developing Countries: A Literature Survey," *Journal of Development Studies* 33(3):287-363.

- Moser, 1996. *Confronting Crisis: A Comparative Study of Household Responses to Poverty and Vulnerability in Four Urban Communities*. Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series 8. Washington D.C.: World Bank.
- Narayan, Deepa. 1995. "Designing Community-Based Development." Social Development paper 7. World Bank, Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series 8. Washington D.C.: World Bank.
- _____. 1997. "Voices of the Poor: Poverty and Social Capital in Tanzania." Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series 8. Washington D.C.: World Bank.
- _____. 1999. "Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty." Policy Research Working paper 2167. World Bank. Poverty Reduction and Economic Management Network, Washington. D.C.
- Narayan, Deepa, and David Nyamwaya. 1996. "Learning from the Poor: A Participatory Poverty Assessment in Kenya." Participation Series 34, World Bank, Social Policy and Resettlement Division, Washington D.C.
- Nartayan, Deeva, and Lant Pritchertt. 1999. "Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania." *Economic Development and Cultural Change* 47(4):871-97.
- National Commission on Philanthropy and Civic Renewal. 1998. "National Index of Civic Engagement." University of Connecticut, Storrs, Conn.
- Onyx, Jenny, and Paul Ballen. 2000. "Measuring Social Capital in Five Communities." *Journal of Applied Behavioral Science*.
- O'Connor, Karen, and Larry J. Sabato. 2002. *American Government: Continuity and Change*. Boston, Mass.: Pearson Custom Publishing.
- Putnam, Robert. D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- _____. 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life." *The American Prospect*, 13(Spring), pp. 35-42.
- _____. 1995. "Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America." *PS: Political Science and Politics* (December):664-83.
- Rubio, Mauricio. 1997. "Perverse Social Capital: Some Evidence from Colombia." *Journal of Economic Issues* 31(3):805-16.
- Schafft, Kai. 1998. "Grassroots Development and the Reconfiguration of Local Political Institutions: Local Minority Self-Governance as a Political and Economic Resource for Hungary's Roma Population." The Graduate Student Conference on International Affairs, George Washington University, Washington, D.C.
- Varshney, Ashutosh. 2000. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslim in India*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Wilson, William Julius. 1987. *When Work Disappears: The World of the New Urban Poor*. New York: Knopf.
- Woolcock, Michel. 1998. "Social Capital and Economic Development: To

ward a Theoretical Synthesis and Policy Framework." *Theory and Society* 27(2):151-208.

World Bank. 1998. *Assessing Aid: What Works, What Doesn't, and Why*. New York: Oxford University Press.